

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DASAR WAJIBPEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Eko Satrya Hermawan¹, Anifatus Zahro²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang Surabaya
Email: ekohermawan@unesa.ac.id

²Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, Jl. Basuki Rahmad No.01 Lamongan
Email: anifatuszahro38@gmail.com

ABSTRAK

Layanan dasar merupakan pilar utama pembangunan daerah yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis capaian layanan dasar di Kabupaten Lamongan tahun 2024 serta implikasinya terhadap pembangunan daerah berkelanjutan. Data primer diperoleh dari laporan resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan, sementara data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, UNDP, dan publikasi ilmiah. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan peningkatan signifikan dalam indikator pendidikan (APM SD 98%, APM SMP 93%), kesehatan (penurunan prevalensi stunting menjadi 13,8%), infrastruktur (65 km jalan kabupaten diperbaiki dan akses air bersih 82%), serta perlindungan sosial-ekonomi (penguatan sektor pertanian & perikanan yang menyumbang >30% PDRB). Capaian ini mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Lamongan ke angka 73,21, melampaui rata-rata nasional. Studi ini menegaskan bahwa tata kelola layanan dasar berbasis inovasi dan kolaborasi menjadi fondasi penting percepatan pencapaian SDGs di tingkat lokal.

Kata kunci: layanan dasar, pembangunan daerah, Lamongan, pendidikan, kesehatan, SDGs

ABSTRACT

Basic services are a key pillar of regional development, encompassing education, health, infrastructure, and social protection. This article aims to analyze the achievement of basic services in Lamongan Regency in 2024 and their implications for sustainable regional development. Primary data were obtained from official reports of the Lamongan Regency Government, while secondary data came from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Health, the Ministry of Education, the UNDP, and scientific publications. Using a descriptive-analytical approach, this study found significant improvements in education indicators (elementary school NER 98%, junior high school NER 93%), health (stunting prevalence decreased to 13.8%), infrastructure (65 km of district roads repaired and access to clean water increased to 82%), and socio-economic protection (strengthening the agriculture and fisheries sectors, which contribute >30% of GRDP). These achievements boosted Lamongan's Human Development Index to 73.21, surpassing the national average. This study confirms that innovation- and collaboration-based basic service governance is a crucial foundation for accelerating the achievement of the SDGs at the local level.

Keyword: basic services, regional development, Lamongan, education, health, SDGs

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penyediaan layanan dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Layanan dasar merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C dan Pasal 34, serta menjadi prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Secara global, penyediaan layanan dasar juga merupakan inti dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan 3 (kesehatan yang baik dan kesejahteraan), tujuan 4 (pendidikan berkualitas), tujuan 6 (air bersih dan sanitasi), serta tujuan 10 (mengurangi kesenjangan).

Penelitian mengenai optimalisasi layanan dasar telah banyak dilakukan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Syafrudin dan Nurlina (2021) menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan dasar di tingkat daerah bergantung pada integrasi antara kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Setiawan (2020) menemukan bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan daerah secara langsung berkorelasi dengan kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks Jawa Timur, Prasetyo et al. (2022) menunjukkan bahwa kabupaten dengan investasi tinggi pada sektor pendidikan dasar dan kesehatan primer cenderung memiliki IPM yang lebih cepat meningkat dibandingkan daerah dengan struktur anggaran yang lebih banyak terserap pada infrastruktur fisik. Sementara itu, Widiastuti dan Raharjo (2021) menggarisbawahi pentingnya inovasi digital seperti e-health dan e-education dalam mempercepat akses layanan dasar, terutama pasca-pandemi COVID-19.

Kajian Fitriani (2023) menegaskan bahwa tata kelola berbasis kolaborasi antarinstansi mampu memperkuat efektivitas pelayanan dasar karena mendorong integrasi data dan transparansi program. Sejalan dengan itu, Santosa dan Hidayat (2022) menyatakan bahwa

pendekatan *community-driven development* berperan penting dalam menjaga keberlanjutan layanan publik di tingkat desa. Dalam skala global, UNDP (2023) dan World Bank (2022) menegaskan bahwa keberhasilan layanan dasar tidak hanya diukur dari input fiskal, tetapi juga efektivitas tata kelola, akuntabilitas publik, serta orientasi pada hasil (*outcome-based governance*).

Model *Human Development Approach* dari Amartya Sen (1999) juga menjadi kerangka penting karena menempatkan kapabilitas manusia sebagai pusat pembangunan. Penelitian Putri dan Mahardika (2024) terbaru menambahkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada layanan dasar mempercepat pencapaian target SDGs tingkat lokal.

Di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (2023) melaporkan bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi kesenjangan layanan dasar antarwilayah. Namun, daerah seperti Lamongan, Banyuwangi, dan Sleman menunjukkan praktik baik dalam inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini dalam menganalisis keberhasilan Kabupaten Lamongan mengoptimalkan layanan dasar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan layanan dasar warganya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa (BPS, 2023), Lamongan menghadapi tantangan klasik pembangunan daerah seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Namun, Pemkab Lamongan berhasil memanfaatkan momentum desentralisasi dan dukungan pemerintah pusat untuk merancang program-program inovatif yang berorientasi pada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, indikator pembangunan manusia di Lamongan menunjukkan tren yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,21, melampaui rata-rata nasional sebesar 72,45 (BPS, 2023). Pencapaian ini tidak lepas dari strategi

optimalisasi layanan dasar, baik melalui program beasiswa pendidikan, intervensi stunting, perbaikan infrastruktur jalan, maupun penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

Penelitian mengenai layanan dasar di tingkat daerah sangat penting dilakukan. Pertama, studi ini memberikan gambaran konkret mengenai implementasi kebijakan nasional di level lokal. Kedua, kajian kasus Lamongan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi daerah lain dalam mengoptimalkan layanan dasar. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi akademik pada diskursus pembangunan daerah berbasis layanan publik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis capaian layanan dasar di Kabupaten Lamongan tahun 2024 pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial-ekonomi; (2) membandingkan capaian Lamongan dengan rata-rata provinsi dan nasional; serta (3) mengkaji implikasinya terhadap percepatan pencapaian SDGs dan pembangunan daerah berkelanjutan.

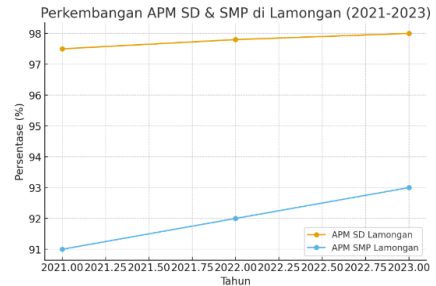
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari dokumen resmi Laporan Kinerja Layanan Dasar Kabupaten Lamongan 2024. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UNDP, World Bank, serta berbagai literatur akademik terkait layanan dasar dan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan capaian indikator layanan dasar Lamongan dengan capaian provinsi Jawa Timur dan nasional. Selain itu, capaian tersebut dikaitkan dengan target RPJMN 2020–2024 dan SDGs untuk melihat relevansi dan prospek jangka panjangnya. Pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori pembangunan manusia Amartya Sen (1999) yang menekankan pentingnya kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan, serta kerangka SDGs yang menekankan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Pendidikan



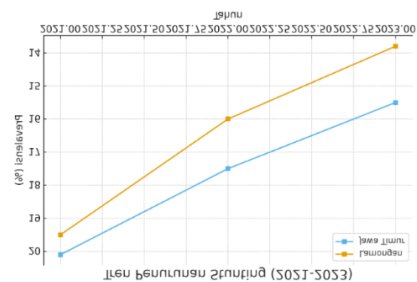
Gambar Perkembangan APM Sekolah

Pendidikan merupakan sektor prioritas Pemkab Lamongan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Lamongan (2024), angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD telah mencapai 98%, sementara APM SMP mencapai 93%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur (97,4% untuk SD dan 91,8% untuk SMP) dan nasional. Program unggulan di sektor pendidikan antara lain:

- **Beasiswa daerah** bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu.
- **Digitalisasi sekolah** melalui pengadaan perangkat TIK dan pembelajaran berbasis digital.
- **Program literasi membaca** yang diperkuat melalui kerja sama dengan perpustakaan daerah.

Capaian ini berdampak pada peningkatan IPM Lamongan. Dimensi pendidikan dalam IPM menunjukkan tren positif dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,9 tahun pada 2023, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya 8,5 tahun (BPS Lamongan, 2023).

2. Kesehatan



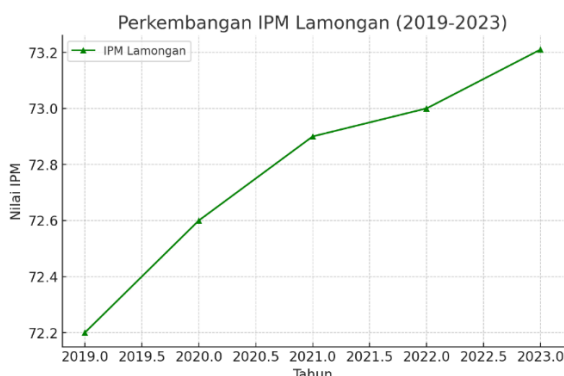
Gambar Tren Penurunan Stunting

Di sektor kesehatan, Pemkab Lamongan berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 19,5% pada 2021 menjadi 13,8% pada 2023 (Kemenkes, 2023). Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang masih berada di 15,5%. Strategi penurunan stunting dilakukan melalui:

- Pemberdayaan posyandu dan kader kesehatan.
- Program edukasi gizi seimbang untuk ibu hamil dan balita.
- Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui 33 puskesmas dan RSUD dr. Soegiri.
- Penempatan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, di wilayah terpencil.

Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai lebih dari 92%, sejalan dengan target nasional. Indikator kesehatan lain seperti angka harapan hidup di Lamongan pada 2023 mencapai 73,8 tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 73,2 tahun.

3. Infrastruktur



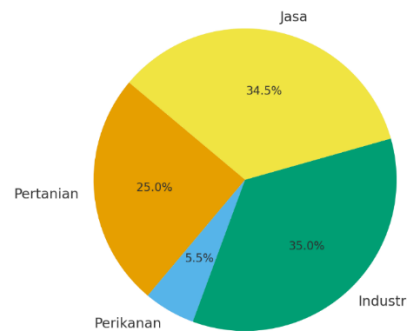
Gambar Perkembangan IPM

Infrastruktur merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi dan sosial. Pada 2023, Pemkab Lamongan berhasil meningkatkan kualitas jalan kabupaten sepanjang 65 km menjadi kategori jalan mantap. Akses air bersih juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan cakupan mencapai 82% rumah tangga pada 2023, mendekati target universal access 100% pada 2030 sesuai SDGs. Selain itu, Pemkab meluncurkan program “**Lamongan Smart City**” yang mengintegrasikan pelayanan publik berbasis digital, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan dan

UMKM. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam pengembangan *e-government*.

4. Perlindungan Sosial dan Ekonomi

Kontribusi PDRB Lamongan per Sektor (%)



Gambar Kontribusi PDRB

Pemkab Lamongan juga menaruh perhatian pada perlindungan sosial. Program bantuan pangan non-tunai, subsidi kesehatan, serta pemberdayaan keluarga miskin menjadi prioritas. Dari sisi ekonomi, sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi tulang punggung daerah dengan kontribusi lebih dari 30% terhadap PDRB Lamongan (BPS Lamongan, 2023). Program industrialisasi perikanan, pengembangan kawasan tambak modern, serta penguatan UMKM berbasis hasil pertanian dan perikanan menjadi strategi unggulan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

PEMBAHASAN

Capaian Lamongan menunjukkan bahwa optimalisasi layanan dasar berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Jawa Timur dan nasional, Lamongan menunjukkan performa yang relatif lebih baik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pencapaian ini relevan dengan target SDGs:

- SDG 3 (Good Health and Well-being) : penurunan stunting dan peningkatan angka harapan hidup.
- SDG 4 (Quality Education) : peningkatan partisipasi pendidikan dan literasi.
- SDG 6 (Clean Water and Sanitation) : cakupan air bersih 82%.

- SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) : penguatan sektor pertanian dan perikanan.
- SDG 10 (Reduced Inequalities) : perlindungan sosial bagi keluarga miskin.

Keberhasilan Lamongan dapat dijelaskan melalui kerangka pembangunan manusia Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan adalah perluasan kapabilitas. Pemkab Lamongan berhasil memperluas kapabilitas masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Namun, tantangan masih ada, antara lain disparitas antarwilayah, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Ke depan, Pemkab perlu memperkuat inovasi digital, kemitraan publik-swasta, serta memastikan keberlanjutan program layanan dasar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan berhasil mengoptimalkan layanan dasar pada 2024 dengan capaian signifikan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial-ekonomi. Capaian ini berkontribusi pada peningkatan IPM Lamongan serta memperkuat daya saing daerah.

Rekomendasi:

1. Memperluas inovasi digital dalam pelayanan publik.
2. Memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
3. Mengembangkan model pembiayaan berkelanjutan untuk layanan dasar.
4. Menjadikan praktik baik Lamongan sebagai model bagi daerah lain.

Dengan langkah-langkah tersebut, Lamongan dapat mempercepat pencapaian SDGs dan mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Penyelenggaraan Amartya Sen. (1999). Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Fitriani, D. (2023). Collaborative governance and innovation in basic service delivery. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 87–100.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Prasetyo, H., Putra, R., & Suryani, L. (2022). Public expenditure and regional human development in East Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 7(2), 101–117.
- Putri, A., & Mahardika, I. (2024). Governance quality and sustainable development in Indonesian local governments. *Asian Public Policy Review*, 9(1), 55–72.
- Santosa, B., & Hidayat, R. (2022). Strengthening community-based public services through participatory governance. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(3), 145–160.
- Setiawan, A. (2020). Kinerja layanan dasar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 45–58.
- Syafrudin, A., & Nurlina, D. (2021). Efektivitas layanan dasar pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 205–220.
- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock*. New York: United Nations Development Programme.
- Widiastuti, F., & Raharjo, B. (2021). Digital transformation of basic public services in the post-pandemic era. *Jurnal Transformasi Pemerintahan Digital*, 2(1), 33–49.
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Governing for Effective Public Service Delivery*. Washington, DC: The World Bank.